

MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN DI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA Mendukung PERTAHANAN NEGARA

FOOD SECURITY MANAGEMENT THROUGH FOOD DIVERSIFICATION PROGRAMS IN NORTH SUMATERA IN SUPPORTING STATE DEFENSE

Maria Dyah Ayu Pitaloka¹, Agus Sudarya², Edy Saptono³

Program Studi Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

mdiaho8@gmail.com, agus.sudarya6795@gmail.com, edy.saptono31@gmail.com

Abstrak - Masalah ketahanan pangan merupakan permasalahan sangat penting, di mana ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Diversifikasi konsumsi pangan merupakan cara alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan beragam sumber karbohidrat dari jenis tanaman selain beras. Tulisan ini ditulis dengan tujuan untuk analisis manajemen ketahanan pangan melalui program diversifikasi pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara, dan di Perum Bulog Sumatera Utara sebagai informasi tambahan mengenai kesiapannya dalam mendata pangan lokal yang dimiliki dan memodifikasi gudangnya agar dapat menyimpan berbagai jenis pangan lokal. Tulisan ini ditulis berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian fenomenologi. Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen ketahanan pangan Pemda Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan ketahanan pangan dengan cara pengolahan pangan lokal dalam peningkatan minat masyarakat dalam konsumsi pangan lokal, pengorganisasian ketahanan pangan dengan cara pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam peningkatan produksi dan konsumsi pangan lokal, pelaksanaan ketahanan pangan dengan cara peningkatan ketersediaan bahan pangan sumber karbohidrat non beras dan pengembangan teknologi, serta pengawasan ketahanan pangan dilakukan dengan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Kendala yang dihadapi dari program diversifikasi pangan di Sumatera Utara yaitu terjadinya konversi lahan pertanian ke nonpertanian, permasalahan irigasi, dan ketergantungan masyarakat terhadap beras masih sangat tinggi.

Kata Kunci: diversifikasi pangan, kemandirian pangan, manajemen ketahanan pangan, pangan lokal, pertahanan negara

Abstract - The problem of food security is a very important issue, where food security indicates the availability of access to food sources to meet the food needs of the community. Diversification of food consumption is an alternative way that people can do to get various sources of carbohydrates from plants other than rice. This thesis is written with the aim of analyzing food security management through the food diversification program carried out by the Food Security and Animal

Husbandry Office of North Sumatra, and at the North Sumatra Bulog Public Corporation as additional information regarding its readiness to record local food owned and modify its warehouse so that it can store various types. local food. This thesis is written based on the results of qualitative research using a phenomenological research design. In this study, the data collection process was carried out using interviews, observation, and documentation studies. The data obtained were then analyzed through four stages, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results showed that the food security management of the North Sumatra Regional Government in meeting the people's food needs consists of 4 functions, namely food security planning by way of local food processing in increasing public interest in local food consumption, organizing food security by means of the government and society together in increasing local food production and consumption, implementing food security by increasing the availability of food sources of non-rice carbohydrates and developing technology, as well as monitoring food security by preparing maps of food security and vulnerability. The obstacles faced by the food diversification program in North Sumatra, namely the conversion of agricultural land to non-agricultural land, irrigation problems, and community dependence on rice is still very high.

Keywords: food diversification, food independence, food security management, local food, national defense

Pendahuluan

Sistem pertahanan bangsa Indonesia yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, baik itu ancaman militer, ancaman nirmiliter, ataupun ancaman hibrida. Pada hakekatnya sistem pertahanan bangsa Indonesia bersifat semesta, di mana adanya pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah,

dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Hal ini berarti perlu adanya pembangunan kekuatan dari dalam untuk mendukung kemandirian pangan sebagai bagian dari terwujudnya ketahanan pangan. Kemandirian pangan merupakan syarat mutlak bagi ketahanan nasional. Salah satu langkah strategis untuk memelihara ketahanan nasional yaitu dengan mewujudkan kemandirian pangan.

Sedangkan kenyataannya kondisi di Indonesia masih mengalami ketergantungan beberapa jenis pangan dari luar negeri. Hal itu disebabkan karena berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat dari pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan berkurangnya sumber

daya manusia pengelola pertanian. Permasalahan tersebut yang masih menjadi penyebab dari berkurangnya ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan pangan ini diprediksi masih dapat berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat harus dapat terpenuhi. Kekurangan pangan yang terjadi dapat mengganggu kegiatan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara sehingga dapat mengganggu kestabilan suatu negara. Pengalaman menunjukkan bahwa kelangkaan pangan, terutama beras, yang menyebabkan melonjaknya harga-harga pada tahun 1966 dan 1998 sangat berpengaruh terhadap terjadinya krisis ekonomi, sosial, dan politik, dan berujung pada jatuhnya rezim pemerintahan saat itu (Suryana, 2003).

Masalah ketahanan pangan merupakan permasalahan sangat penting dan juga rentan bermasalah pada kondisi bencana, termasuk bencana wabah penyakit yang terjadi saat ini yaitu pandemi Covid-19. Ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap

sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan (Rosales dan Mercado, 2020). Kondisi pandemi Covid-19 ini mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemi itu sendiri serta adanya larangan perpindahan penduduk yang mengikutinya. Hal ini juga sesuai dengan dengan Burgui (2020), yang menyatakan bahwa wabah suatu penyakit yang terjadi di dunia akan meningkatkan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dan malnutrisi.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan pastinya tidak terlepas dari sifat produksi pangan yang bergantung pada musiman dan dapat berfluktuasi tergantung dari iklim atau cuaca ataupun kondisi lainnya seperti kasus pandemi Covid-19 yang

mempengaruhi produksi dan penyebaran komoditi pangan. Perilaku produksi tersebut dapat memengaruhi kondisi ketersediaan pangan nasional. Apabila perilaku produksi yang rentan tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka dapat merugikan produsen dan konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah.

Kebutuhan pangan bagi masyarakat harus selalu tercukupi, di mana saat ini kondisi pertumbuhan masyarakat yang semakin tinggi tetapi tidak diikuti dengan kondisi pertumbuhan pangan yang tinggi pula. Dalam menghadapi persoalan pangan saat ini dan ke depan diperlukan pemikiran dan rencana aksi bersama melalui pendekatan suatu institusi untuk terwujudnya ketahanan pangan, kedaulatan pangan, serta kemandirian pangan nasional. Dampak dan resiko dari terjadinya kekurangan pangan di Indonesia yang tidak segera dilakukan penanganan yang serius dapat menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan yang semakin melebar, ketimpangan dalam ketersediaan pangan yang dapat mengancam perekonomian, meningkatnya daerah

rawan pangan dan kelaparan, serta meningkatnya konversi lahan pertanian untuk kepentingan lain.

Kelangkaan pangan harus diatasi, salah satu caranya dengan mengembangkan pangan lokal untuk menguatkan diversifikasi pangan. Kekurangan pangan ini perlu disikapi melalui kebangkitan pertanian dengan kebijakan tegas dan komprehensif, mengurangi ketergantungan produk beras dengan cara melakukan diversifikasi dari pangan lokal seperti ubi kayu dan jagung. Selain itu, pemerintah juga harus mampu membangun *image* produk pangan lokal sebagai pangan pokok yang setara dengan beras.

Kearifan lokal masyarakat Indonesia merupakan salah satu cara dalam mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka masyarakat harus memperkuat kearifan lokal sesuai dengan kondisi sosial budaya daerahnya. Hal tersebut dikarenakan dalam perwujudan ketahanan pangan nasional berawal dari ketahanan pangan daerah, dan ketahanan pangan daerah berawal dari kearifan lokal. Tradisi yang dimiliki oleh setiap daerah yang merupakan landasan berperilaku masyarakat sehari-hari terutama dalam hal pengelolaan pangan,

dapat menjaga ketersediaan pangan masyarakat dan dapat mendukung ketahanan pangan.

Ketahanan pangan minimal mengandung unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas masyarakat, dan stabilitas harga pangan. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Aspek distribusi pangan sampai ke pelosok rumah tangga perdesaan, merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memperkuat strategi ketahanan pangan (Arifin, 2005). Kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Kementerian Pertanian mengantisipasi terjadinya kelangkaan

pangan melalui berbagai langkah strategis di antaranya, yaitu percepatan pertanaman, perluasan areal tanam baru, penguatan cadangan pangan. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengembangkan pangan lokal untuk menguatkan diversifikasi pangan. Pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, proses manajemen ketahanan pangan nasional dapat ditingkatkan dengan adanya diversifikasi pangan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, dalam hal memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan salah satu caranya yaitu dengan program pembangunan ketahanan pangan dengan program peningkatan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja, sehingga dapat mengurangi konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok dengan adanya penambahan pangan lokal lainnya, seperti ubi kayu dan jagung. Upaya dalam diversifikasi pangan masih belum menunjukkan hasil yang baik. Oleh sebab

itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasana dalam menunjang produksi pangan lokal, sehingga upaya diversifikasi pangan dapat berjalan dengan baik.

Usaha diversifikasi pangan hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang konsumsi pangan yaitu mengembangkan diversifikasi pangan dengan menggali sumber karbohidrat dan teknologi pengolahan pangan pokok yang berasal dari bahan pangan lokal. Diversifikasi konsumsi pangan merupakan cara alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan beragam sumber karbohidrat dari jenis tanaman selain beras. Upaya yang dilakukan masyarakat melalui model perencanaan dengan memberdayakan kemampuan sumber daya ekonomi terlihat sebagai suatu karakteristik masyarakat pedesaan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Perum Bulog sedang melakukan pembangunan sistem penyerapan dan penyaluran pangan lokal. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui program diversifikasi sumber

pangan. Saat ini, Bulog sedang melakukan identifikasi berbagai jenis pangan unggulan di setiap daerah. Nantinya, Bulog akan memodifikasi gudangnya agar dapat menyimpan berbagai jenis pangan lokal sesuai dengan karakteristiknya. Menurut Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, sumber karbohidrat tidak hanya didapatkan dari beras, tetapi juga dapat diperoleh dari pangan lokal. Oleh sebab itu, Bulog sedang mencoba untuk berperan dalam penyerapan produksi pangan lokal (Kompas, 2020). Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis kesiapan dan manajemen ketahanan pangan melalui program diversifikasi pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara, serta di Perum Bulog Sumatera Utara sebagai informasi tambahan mengenai kesiapannya dalam mendata pangan lokal yang dimiliki dan memodifikasi gudangnya agar dapat menyimpan berbagai jenis pangan lokal yang sesuai dengan karakteristiknya.

Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan sumber pangan lokal. Akan tetapi, konsumsi dan pengolahan produk pangan lokal masih sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang masih

tergantung pada beras sebagai bahan pangan pokok dan sebagai sumber utama karbohidrat. Padahal pangan lokal seperti umbi-umbian memiliki kandungan gizi yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai bahan pangan pokok. Selain itu, pangan lokal sangat penting dan merupakan bagian dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Peningkatan ketahanan pangan harus didukung dengan adanya diversifikasi konsumsi pangan yang bertumpu pada keanekaragaman sumber daya pangan, khususnya pangan lokal.

Potensi sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam sepanjang waktu dan di setiap daerah, maka peluang untuk mengembangkan diversifikasi pangan akan semakin terbuka melalui pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung dengan perkembangan teknologi informatika serta strategik komunikasi publik, dapat memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi

masyarakat sehingga mencapai status gizi yang baik dan dapat mengurangi tingginya konsumsi beras di masyarakat. Penganekaragaman pangan tersebut dapat mendukung ketahanan pangan, sehingga pemberdayaan dan pemanfaatan potensi pangan lokal harus terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.

Upaya diversifikasi pangan, melalui pemanfaatan sumber pangan lokal yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Produksi beras yang tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri mengharuskan pemerintah untuk melakukan impor beras. Seharusnya, pemerintah dapat melakukan penganekaragaman pangan agar ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi. Oleh sebab itu, pemerintah harus berupaya dalam mengedukasi masyarakat agar mengurangi konsumsi beras dan mengalihkannya ke konsumsi pangan yang lebih beragam. Salah satu caranya dengan meningkatkan minat masyarakat dalam konsumsi pangan lokal.

Peneliti lebih memfokuskan pada program diversifikasi pangan lokal dalam

mendukung ketahanan pangan nasional. Fenomena yang terjadi bahwa dalam memenuhi kebutuhan karbohidratnya, masyarakat hanya mengkonsumsi beras saja sebagai bahan pangan pokok. Padahal jumlah produksi pangan lokal seperti ubi kayu dan jagung sangat banyak dan dapat menjadi sumber karbohidrat serta menjadi bahan pangan pokok yang dapat dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Ketahanan pangan di Sumatera Utara dapat terwujud dengan adanya program diversifikasi pangan dengan pemanfaatan pangan lokal seperti ubi kayu dan jagung sebagai bahan pangan pokok. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian mengenai **“Manajemen Ketahanan Pangan melalui Program Diversifikasi Pangan di Sumatera Utara dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara”**.

Ketersediaan pangan tingkat nasional dan regional tidak menjamin terpenuhinya ketahanan pangan tingkat rumah tangga atau individu. Hal tersebut dikarenakan ketahanan pangan rumah tangga atau individu sangat ditentukan oleh akses untuk mendapat pangan tersebut. Oleh sebab itu, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen merupakan faktor penentu akses rumah tangga terhadap pangan. Selain itu, pada

tingkat pengambil kebijakan, kejadian rawan pangan dapat disebabkan oleh masalah kebijakan stabilitas harga pangan dan manajemen cadangan atau stok pangan. Pengelolaan pangan terkait manajemen ketahanan pangan nasional terhadap kebutuhan rakyat khususnya di era pandemi Covid-19 masih perlu terus dikaji terkait kesiapan dan pelaksanaannya. Pada penelitian ini dapat diuraikan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana manajemen ketahanan pangan Pemda Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi dari program diversifikasi pangan di Sumatera Utara?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis manajemen ketahanan pangan Pemda Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat.
- b. Menganalisis kendala yang dihadapi dari program

diversifikasi pangan di Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pengembangan atas penjelasan dari fenomena sosial yang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dilakukan untuk menangkap dan melihat berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Fenomenologi berupaya mengungkapkan dan memahami realitas penelitian berdasarkan perspektif subjek penelitian. Selanjutnya, data penelitian akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan berdasarkan teori-teori yang dipelajari dan dijadikan sebagai bahan pembahasan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi pemerintah untuk membuat suatu langkah strategis dan kebijakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rakyat, serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat melakukan manajemen ketahanan pangan dengan baik di era

pandemi Covid-19 dalam mendukung pertahanan negara.

Hasil Penelitian

Manajemen Ketahanan Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat

Pelaksanaan manajemen ketahanan pangan melalui program diversifikasi pangan yang dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut serta di Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan ketahanan pangan, pengorganisasian ketahanan pangan, pelaksanaan ketahanan pangan, dan pengawasan ketahanan pangan. Berikut adalah uraian hasil manajemen ketahanan pangan yang telah dilakukan pada penelitian ini:

Perencanaan ketahanan pangan

Untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut tengah melakukan gerakan diversifikasi pangan lokal. Gerakan diversifikasi pangan lokal merupakan salah satu strategi dalam mendukung ketahanan pangan. Diversifikasi pangan berarti konsumsi pangan masyarakat tidak hanya bergantung pada pangan pokok beras, tetapi juga pangan lokal seperti jagung

dan ubi yang dapat menjadi bahan pangan pengganti beras.

Perencanaan program diversifikasi karbohidrat pengganti beras tahun 2020-2024, yaitu dengan target konsumsi beras di tahun 2024 turun menjadi 85 kg/kap/tahun dan meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti ubi kayu, jagung, kentang, talas, sagu, dan pisang sebagai sumber karbohidrat.

Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut dalam mendukung ketahanan pangan, yaitu:

- 1) Pengembangan Koorporasi Usaha Tani
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan)
- 3) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
- 4) Pemberdayaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan/Miskin (PDRP)
- 5) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Pengorganisasian ketahanan pangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah atau kewenangan

provinsi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan, serta tugas pembantuan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan.
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengorganisasian ketahanan pangan dilakukan dengan cara pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam peningkatan produksi dan

konsumsi pangan lokal dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan, di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah atau kewenangan provinsi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan. Sedangkan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

Beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara masih mengalami kerawanan pangan, yaitu kondisi dimana tidak tersedianya bahan pangan. Kerawanan pangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Kerawanan pangan secara kronis (bersifat menahun)

Kelompok rawan pangan dibagi menjadi 3 Prioritas, yaitu Prioritas 1 adalah tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kategori tinggi, Prioritas 2 adalah tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kategori sedang, dan Prioritas 3 adalah tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kategori

rendah. Kabupaten- kabupaten di Sumatera Utara yang termasuk dalam kelompok rawan pangan, yaitu Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Padang Lawas Utara. Cadangan pangan yang sedikit mengakibatkan daerah tersebut menjadi rawan pangan. Daerah- daerah tersebut mengandalkan pangan lokal pisang sebagai makanan pokok. Akan tetapi, akibat kurangnya variasi asupan pangan dan gizi mengakibatkan terjadinya stunting dan banyak balita yang mengalami gizi buruk.

- 2) Kerawanan pangan transien

Kerawanan pangan transien dibagi menjadi dua, yaitu (1) Berulang (*cyclical*), dimana terdapat suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya "musim paceklik" yang terjadi pada periode sebelum panen, dan (2) Temporal (*temporary*), yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek seperti terjadinya bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, serta adanya pandemi covid-19 seperti yang terjadi saat ini.

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut memiliki kapasitas gudang untuk penyimpanan beras yaitu sebanyak 119.750 ton. Jumlah kapasitas gudang yang dapat digunakan, yaitu sebesar 84.750 ton. Jumlah gudang yang dimiliki tersebut hanya dapat menyimpan beras saja yang diperoleh dari dalam negeri, karena ketika ada beras hasil impor maka jumlah gudang yang dimiliki tidak dapat menampung seluruh beras dari hasil impor tersebut. Oleh sebab itu, Perum Bulog melakukan penyewaan gudang agar dapat menampung seluruh beras tersebut.

Pelaksanaan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan cara peningkatan ketersediaan bahan pangan sumber karbohidrat non beras, pengembangan teknologi dalam menghasilkan pangan berbasis sumber daya lokal, dan pengembangan gerai atau outlet yang menjual pangan berbahan baku pangan lokal dengan penampilan yang lebih menarik dan harga yang terjangkau.

Pengawasan ketahanan pangan

Perum Bulog Kanwil Sumut akan selalu melakukan pengawasan dalam menjaga kualitas dan kuantitas dari beras. Selain itu, Perum Bulog Kanwil Sumut juga akan selalu menjamin

terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya program pemberian bantuan beras dan juga dilakukannya operasi pasar dalam menjamin stabilisasi harga kebutuhan pokok konsumen.

Upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sangat penting untuk mengetahui siapa, berapa banyak, dimana mereka berada dan mengapa rumah tangga rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Oleh sebab itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut melakukan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA). FSVA berfungsi untuk menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Kendala yang Dihadapi dari Program Diversifikasi Pangan di Sumatera Utara

Beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Minat masyarakat dalam konsumsi makanan pokok selain beras masih rendah. Belum adanya teknologi pengolahan pangan yang baik di Sumatera Utara, menyebabkan pangan lokal yang ada hanya langsung dikonsumsi tanpa ada pengolahan

menjadi pangan turunan seperti tepung atau pun pembuatan beras analog. Pangan lokal seperti ubi biasanya hanya diolah dengan digoreng, direbus, atau dikukus saja sehingga minat masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal ubi tersebut sangat rendah, masyarakat akan lebih memilih untuk mengkonsumsi nasi dibandingkan dengan ubi.

Strategi yang dapat dilakukan dalam melakukan diversifikasi pangan lokal, yaitu dengan cara:

- 1) Strategi digitalisasi dan inovasi produksi
- 2) Strategi nilai tambah produk
- 3) Strategi segmen pasar
- 4) Strategi distribusi: digitalisasi dan komunitas
- 5) Strategi literasi

Kendala yang dihadapi dapat dilihat dari segi para petani, di mana para petani mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah agar dapat membantu mengatasi masalah pertanian, salah satunya yaitu permasalahan tidak adanya irigasi yang sangat menyulitkan para petani, dimana mereka hanya mengandalkan air hujan untuk penyiraman pertanian mereka. Selain itu, penetapan harga hasil panen yang lebih baik sehingga tidak merugikan para petani, di mana perlu adanya

pemberantasan monopoli perdagangan yang sangat merugikan para petani. Adanya perubahan minat masyarakat dalam konsumsi pangan lokal dapat menguntungkan para petani dimana harga pangan lokal dapat lebih baik dibandingkan saat ini.

Kendala yang dihadapi juga dapat dilihat dari segi masyarakat. Masyarakat di Sumatera Utara masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok sumber karbohidrat. Mereka menganggap bahwa jika tidak makan nasi sama halnya dengan belum makan. Nasi merupakan makanan utama yang harus tersedia dalam menu makanan mereka.

Adanya pengolahan pangan lokal menjadi produk seperti beras analog dapat meningkatkan konsumsi pangan lokal. Masyarakat masih banyak yang mengkonsumsi beras dibandingkan pangan lokal yang lain, dikarenakan proses pengolahan beras yang lebih mudah dan lebih enak untuk dikonsumsi serta dapat lebih membuat kenyang. Hal tersebut yang menjadikan beras masih terus diminati dan menjadi makanan pokok dibandingkan dengan pangan lokal lainnya.

Kendala yang dihadapi dari program diversifikasi pangan di Sumatera Utara yaitu pertumbuhan luas

panen yang sangat terbatas karena laju perluasan lahan pertanian baru sangat rendah, di mana banyak terjadi konversi lahan pertanian ke nonpertanian yang sulit dikendalikan, kemudian adanya degradasi sumber daya air dan kinerja irigasi, serta turunnya tingkat kesuburan fisik dan kimia lahan pertanian, serta adanya gejala stagnan dalam pertumbuhan produktivitas pangan.

Selain itu, jumlah produksi pangan lokal yang tidak sebanyak beras mengakibatkan jumlah masyarakat yang mengkonsumsi beras masih tinggi. Hal tersebut dikarenakan para petani yang lebih suka menanam beras dibandingkan ubi dan jagung, karena harga jual beras lebih tinggi dibandingkan pangan lokal sehingga dapat lebih menguntungkan para petani. Di sisi lain, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras masih sangat tinggi, karena adanya anggapan masyarakat bahwa beras lebih mudah untuk disimpan dan memiliki rasa yang enak. Kendala lainnya karena produk pangan lokal di pasaran yang masih dalam bentuk belum siap olah sehingga membuat masyarakat kurang menyukainya.

Pembahasan

Manajemen Ketahanan Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat

Ketahanan pangan dilaksanakan sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Ketahanan pangan memiliki 3 komponen utama, yaitu:

1) Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam menyediakan pangan bagi kebutuhannya sehari-hari. Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional atau wilayah merupakan unsur penting dalam membangun ketahanan pangan dan gizi. Akan tetapi, ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan provinsi tidak menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga atau individu. Pangan dapat tersedia secara fisik namun ada sebagian rumah tangga yang tidak dapat mengakses kebutuhan pangan mereka yang dapat disebabkan karena tidak didapatnya distribusi pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun keragamannya.

2) Akses Pangan

Akses pangan merupakan kemampuan rumah tangga dalam mengakses dan memperoleh pangan yang cukup, baik itu berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, pinjaman, hadiah, dan bantuan pangan dari kombinasi diantara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah sudah tercukupi tetapi tidak menjamin semua rumah tangga memiliki kemampuan dalam mengakses pangan tersebut. Akses pangan mengacu kepada kemampuan dalam membeli kebutuhan pangan. Kasus penyebab terjadinya kelaparan atau pun kekurangan gizi seringkali bukan disebabkan karena kelangkaan pangan, namun karena ketidakmampuan dalam mengakses pangan karena faktor kemiskinan.

3) Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan merujuk kepada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu dalam menyerap dan metabolisme zat gizi yang diperoleh dari pangan yang dikonsumsi. Pemanfaatan pangan tidak hanya meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian pangan, tetapi juga termasuk penggunaan air dan bahan

bakar selama proses pengolahannya. Kondisi higienis, budaya, atau pun kebiasaan pemberian pangan perlu diperhatikan terutama pada individu yang memerlukan jenis pangan khusus dan kebutuhan masing-masing individu.

Berikut adalah uraian hasil manajemen ketahanan pangan yang telah dilakukan pada penelitian ini:

Perencanaan ketahanan pangan

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan juga terjamin mutunya bagi setiap warga negaranya. Hal tersebut dikarenakan setiap warga negara memiliki hak atas pangan untuk keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan dan terus ditingkatkan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Handewi Purwati Saliem dkk. (2005), yang menyatakan bahwa pemantapan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan suatu negara. Hal itu dikarenakan pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi

sumber daya manusia suatu bangsa. Oleh karena itu, program ketahanan pangan perlu dijadikan sebagai salah satu fokus utama dalam kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian.

Perum Bulog Pusat telah meluncurkan produk pangan baru berupa beras singkong. Produk beras singkong tersebut diberi nama Besita atau Beras Singkong Petani. Hal tersebut dapat memacu Perum Bulog Kantor Wilayah lainnya, khususnya di Sumatera Utara ini untuk ikut dalam mengembangkan produk beras dari bahan pangan lokal singkong.

Adanya produk pangan baru tersebut yang berasal dari bahan baku pangan lokal dapat meningkatkan produksi dan konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal. Pangan beras singkong ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsinya dan mulai beralih dari beras ke beras singkong, di mana hal tersebut dapat mendukung program diversifikasi pangan dan dapat menurunkan impor beras dalam pemenuhan kebutuhan beras masyarakat.

Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan

dan Peternakan Prov. Sumut dalam mendukung ketahanan pangan, yaitu:

1) Pengembangan Koorporasi Usaha Tani

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang membantu masyarakat dalam mengembangkan UKM yang terdapat di kabupaten atau kota. Salah satu bentuk bantuan yang dilakukan yaitu di Kabupaten Samosir, dengan memberikan bantuan dalam bentuk bibit kentang dan ubi jalar, pupuk serta alat yang digunakan untuk UKM Samosir. Produk yang mereka hasilkan berupa keripik kentang dan keripik ubi jalar. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan yaitu dengan melakukan pertemuan dan saling bertukar pengetahuan antar UKM yang ada di Sumatera Utara.

2) Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan)

Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian bantuan yang dapat meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat. Pemberian bantuan tersebut dalam bentuk pemanfaatan lahan pekarangan. Jenis bantuan yang diberikan kepada

masyarakat dalam bentuk ternak, yaitu ayam, kambing, dan babi.

3) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemberdayaan lumbung pangan melalui kegiatan yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk dapat dimanfaatkan terutama pada masa sulit, seperti terjadinya gagal panen, paceklik, dan bencana alam.

4) Pemberdayaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan/Miskin (PDRP)

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan penanganan desa rawan pangan/miskin melalui beberapa kegiatan diantaranya, yaitu gerakan masyarakat mandiri pangan, pengembangan akses pangan, penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis, dan penanggulangan gizi buruk.

5) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dilakukan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan

suatu kawasan yang terhimpun dalam suatu kelompok masyarakat yang diberdayakan untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Bantuan yang diberikan berupa bibit sayuran dan hewan ternak seperti ayam dan itik, serta benih ikan lele. Pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pola konsumsi tiap keluarga dalam penganekaragaman makanan dan pemenuhan gizi pangan, serta dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus membeli.

Pengorganisasian ketahanan pangan

Urusan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena: (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.

Perum Bulog Kanwil Sumut harus berperan serta dalam mengenalkan bahan pangan non beras sebagai sumber makanan karbohidrat. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dan juga untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal yang dapat mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

Perum Bulog Kanwil Sumut harus dapat memosisikan diri sebagai promotor dan fasilitator produk dan hasil olahan pangan lokal seperti umbi-umbian dan jagung untuk mendukung program diversifikasi pangan agar

terwujudnya ketahanan pangan. Adanya pengolahan pangan dari pangan lokal dapat terus meningkatkan jumlah produksi pangan lokal. Pengolahan pangan lokal tersebut juga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi dan mulai beralih dari konsumsi beras menjadi konsumsi pangan lokal sebagai makanan pokok.

Pelaksanaan ketahanan pangan

Ketersediaan pangan di tingkat nasional dan regional tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga atau individu. Hal ini sesuai dengan penelitian Handewi Purwati Saliem dkk. (2005), yang menyatakan bahwa di samping adanya ketersediaan pangan, ketahanan pangan rumah tangga/individu sangat ditentukan juga oleh akses untuk mendapatkan pangan tersebut. Dalam hal ini tingkat pendapatan dan daya beli merupakan faktor penentu akses rumah tangga terhadap pangan. Selain itu, di tingkat pengambil kebijakan, kejadian rawan pangan antara lain terkait dengan masalah kebijakan stabilitas harga pangan dan manajemen cadangan atau stok pangan.

Kondisi suatu desa belum dapat dikatakan mandiri pangan apabila masih terdapat masalah ketahanan pangan

yang tercermin dari belum adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Pada rumah tangga miskin, pengeluaran pangan akan lebih besar dari pada pengeluaran non pangan sehingga dapat berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. Pemenuhan gizi yang didapat dari pangan yang dikonsumsi dapat menentukan tingkat konsumsi. Semakin tinggi nilai gizi pangan yang dilihat dari energi yang dikonsumsi, maka tingkat konsumsi energi juga akan meningkat (Arida dkk., 2015).

Kondisi masyarakat di beberapa daerah di Sumatera Utara masih banyak yang mengalami stunting dan gizi buruk yang terjadi pada balita. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya variasi asupan pangan dan gizi. Padahal kondisi masyarakat yang masih mengalami stunting tersebut dapat mengganggu pertahanan negara. Oleh sebab itu, perlu adanya kekuatan dari dalam dengan adanya pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya dalam mendukung pertahanan negara, yang dapat diwujudkan melalui kemandirian pangan agar ketahanan pangan dapat tercapai. Peningkatan ketahanan pangan ini dapat dilakukan

dengan adanya pemanfaatan pangan lokal.

Adanya ketergantungan konsumsi pangan pokok beras dapat menimbulkan permasalahan ketahanan pangan nasional. Ketergantungan pangan beras dapat dikurangi dengan dikembangkannya diversifikasi pangan sebagai upaya alternatif sekaligus peningkatan pola pangan yang memenuhi kecukupan nutrisi dan mutu gizi (Elizabeth, 2011). Diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan adanya pemanfaatan pangan lokal sebagai varian makanan pengganti beras. Di Sumatera Utara produksi pangan lokal seperti ubi dan jagung cukup besar, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan minat masyarakat dalam konsumsi pangan lokal. Peningkatan minat masyarakat dalam konsumsi pangan lokal ini dapat dilakukan dengan adanya pengolahan pangan lokal tersebut menjadi produk makanan lain, misalnya menjadi produk beras.

Perum Bulog Pusat telah menghasilkan produk beras dari singkong yang diberi nama Beras Besita. Adanya peluncuran beras singkong tersebut diharapkan dapat memfasilitasi pemasaran produk dan hasil olahan singkong petani, sehingga dapat

membantu mensejahterahkan para petani. Hal tersebut dapat menjadi suatu pemicu bagi Perum Bulog Kanwil Sumut untuk ikut dalam pembuatan produk beras singkong. Pembuatan beras singkong dapat menjadi suatu langkah dalam melancarkan program diversifikasi pangan yang dapat mendukung ketahanan pangan.

Oleh sebab itu, Perum Bulog Kanwil Sumut harus mulai mempersiapkan gudangnya dan juga mulai fokus pada penyediaan pangan lokal. Selain berfokus pada penyiapan gudang dan penyediaan pangan lokal, juga harus mulai mempersiapkan teknologi dalam mengolah pangan lokal menjadi produk olahan seperti beras singkong. Perum Bulog Kanwil Sumut perlu menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Sumut dalam pengolahan produk beras dari bahan baku singkong.

Pengawasan ketahanan pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus selalu dapat terpenuhi dalam jumlah yang cukup, dengan mutu yang layak, aman dikonsumsi, dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kebutuhan pangan bagi masyarakat harus dapat terpenuhi sampai dengan tingkat

perseorangan. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan terus dilakukan untuk memperbaiki konsumsi pangan masyarakat baik dari segi jumlah maupun mutu dan keseimbangan gizinya.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Produksi pangan selain beras harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Pangan lokal seperti umbi-umbian dapat berpotensi menjadi pangan pokok sumber karbohidrat. Oleh sebab itu, produksi pangan lokal dan pengolahan pangan lokal harus terus ditingkatkan dalam mendukung ketahanan pangan.

Terjaganya ketahanan pangan dapat dilihat dari tiga pilar, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan dilihat dari kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang

berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan.

Pilar ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (a) pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga dan (b) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi, yaitu pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan oleh rumah tangga tergantung pada: (i) fasilitas penyimpanan dan pengolahan makanan yang dimiliki oleh rumah tangga; (ii) pengetahuan dan praktek yang berhubungan dengan penyiapan makanan, pemberian makanan untuk balita dan anggota keluarga lainnya yang sedang sakit atau sudah tua; (iii) distribusi makanan dalam keluarga; dan (iv) kondisi kesehatan masing-masing individu yang mungkin menurun karena penyakit, kebersihan, air dan sanitasi yang buruk dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Kendala yang Dihadapi dari Program Diversifikasi Pangan di Sumatera Utara

Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala dari program diversifikasi pangan lokal, yaitu dengan cara:

- 1) Strategi digitalisasi dan inovasi produksi
Usaha tani dan agroindustri pangan lokal harus disentuh dengan teknologi 4.0 serta memiliki daya tarik bagi generasi digital. Selain itu, perlu diintegrasikan dengan komunitas, edukasi, dan pariwisata
- 2) Strategi nilai tambah produk
Pangan lokal harus ditingkatkan nilai tambahnya, perlu adanya penambahan kreasi olahan pangan lokal, inovasi baru terhadap olahan pangan lokal, dan penggunaan teknologi dalam pembuatan olahan pangan lokal.
- 3) Strategi segmen pasar
Pasar pangan lokal harus dapat membus berbagai pasar, baik itu pasar tradisonal, pasar modern, pasar industri (pangan, pakan, bioenergi), dan juga dilakukannya ekspor. Hal tersebut dapat menguntungkan petani, karena dapat meningkatkan harga jual hasil panen para petani.
- 4) Strategi distribusi: digitalisasi dan komunitas
Pangan lokal segar, olahan, dan fungsional harus mudah untuk diakses oleh masyarakat, baik secara fisik ataupun virtual. Hal tersebut

penting untuk meminimalisir terjadinya monopoli, sehingga jaringan distribusinya harus berbasis komunitas masyarakat.

5) Strategi literasi

Literasi, promosi, internalisasi, dan branding harus dilakukan oleh semua pihak baik dalam bentuk fisik maupun virtual, melalui beragam media, dan juga melalui komunitas yang terdapat dalam masyarakat.

Krisis pangan yang dihadapi Indonesia saat ini akan kian masif jika terus mengandalkan impor kebutuhan pangan tanpa memperhatikan dan menggenjot produksi pangan lokal. Diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal merupakan salah satu kebijakan dalam pembangunan pangan agar ketahanan pangan dapat tercapai. Masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada satu pangan pokok beras sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga dapat melihat dan mengkonsumsi pangan lokal yang dapat berpotensi menjadi pangan pokok sumber karbohidrat. Oleh sebab itu, strategi dan upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan mengolah pangan lokal menjadi bentuk pangan turunan seperti dalam bentuk tepung

dan dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan makanan.

Selain itu, adanya perkembangan teknologi pangan diharapkan dapat mendukung upaya diversifikasi pangan, yaitu dengan cara mengolah pangan lokal sumber karbohidrat menjadi produk yang dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk olahan dari bahan pangan lokal, yaitu pembuatan beras analog. Beras analog memiliki karakteristik bentuk dan rasa yang menyerupai beras dan cara masaknya sama seperti beras biasanya, sehingga diharapkan pengolahan pangan lokal menjadi beras analog dapat lebih diterima masyarakat dan konsumsi pangan lokal dapat semakin meningkat. Beras analog merupakan tiruan dari beras yang terbuat bahan-bahan seperti umbi-umbian dan sereal yang bentuk maupun komposisi gizinya mirip seperti beras. Khusus untuk komposisi gizinya, beras analog bahkan dapat melebihi apa yang terkandung pada beras (Mamuaja dan Lamaega, 2015). Beras analog merupakan salah satu bentuk solusi yang dapat dikembangkan dalam mengatasi permasalahan ini baik dalam hal penggunaan sumber pangan baru ataupun untuk penganekaragaman pangan, bahkan beras analog memiliki

kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan beras.

Permasalahan ketahanan pangan tidak lepas dari pentingnya peran para petani. Petani sangat berperan penting dalam pemenuhan pangan bagi masyarakat. Akan tetapi, para petani sering tidak begitu diperhatikan, di mana dapat kita lihat dari infrastruktur pertanian yang masih belum baik, adanya permasalahan irigasi sehingga sering menyebabkan para petani kesulitan dalam penyediaan air untuk tanamannya. Selain itu, teknologi paska panen yang kurang, di mana para petani hanya mengandalkan rumah mereka yang seadanya dalam penyimpanan hasil panen mereka. Di sisi lain, lahan-lahan pertanian terus menyusut akibat terjadinya pengalihan fungsi menjadi perumahan dan industri.

Petani yang masih terus berfokus pada penanaman padi dibandingkan dengan produk pangan lokal lainnya dikarenakan harga jual beras yang jauh lebih tinggi dibandingkan pangan lokal lainnya. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat harus dapat terlibat, di mana perlu adanya peningkatan minat konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal dan adanya penjaminan dari

pemerintah terhadap harga jual hasil panen yang layak.

Kearifan lokal masyarakat merupakan salah satu cara dalam mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka masyarakat harus memperkuat kearifan lokal sesuai dengan kondisi sosial budaya daerahnya. Hal tersebut dikarenakan dalam perwujudan ketahanan pangan nasional berawal dari ketahanan pangan daerah, dan ketahanan pangan daerah berawal dari kearifan lokal. Tradisi yang dimiliki oleh setiap daerah yang merupakan landasan berperilaku masyarakat sehari-hari terutama dalam hal pengelolaan pangan, dapat menjaga ketersediaan pangan masyarakat dan dapat mendukung ketahanan pangan.

Kemandirian pangan dapat mendukung pertahanan negara. Hal tersebut dikarenakan suatu negara yang mandiri pangan, atau dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, dapat mencegah terjadinya kekurangan pasokan pangan yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup suatu negara. Kemandirian pangan dapat diwujudkan dengan adanya pemanfaatan pangan lokal.

Makanan pokok masyarakat di Sumatera Utara adalah beras.

Konsumsi beras sebagai makanan pokok masih sangat tinggi. Padahal di Sumatera Utara produksi pangan lokal seperti ubi dan jagung cukup tinggi. Ketergantungan masyarakat terhadap beras menyebabkan semakin rendahnya konsumsi pangan lokal dan semakin meningkatnya konsumsi beras, serta mengakibatkan meningkatnya ketergantungan terhadap impor beras. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan pola pangan pokok dari konsumsi beras menjadi konsumsi umbi-umbian atau pun jagung.

Tingkat produksi dan konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap pangan lokal dapat mendukung ketahanan pangan. Upaya diversifikasi pangan dengan pemanfaatan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras sehingga dapat menurunkan impor beras. Hal tersebut dapat mendukung terjadinya kemandirian pangan, di mana produksi pangan yang beraneka ragam dapat diperoleh dari dalam negeri dalam menjamin kebutuhan pangan sampai pada tingkat perseorangan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada penelitian ini telah diuraikan mengenai manajemen ketahanan

pangan melalui program diversifikasi pangan di Sumatera Utara dalam rangka mendukung pertahanan negara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Manajemen ketahanan pangan Pemda Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan ketahanan pangan, pengorganisasian ketahanan pangan, pelaksanaan ketahanan pangan, dan pengawasan ketahanan pangan. Perencanaan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan cara pengolahan pangan lokal dalam peningkatan minat masyarakat dalam konsumsi pangan lokal, pengembangan korporasi usaha tani, pemberdayaan masyarakat miskin melalui program aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan), pengembangan lumbung pangan masyarakat, Pemberdayaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan/Miskin (PDRP), dan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Pengorganisasian ketahanan pangan dilakukan dengan cara pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam

peningkatan produksi dan konsumsi pangan lokal dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan. Pelaksanaan ketahanan pangan yang dilakukan yaitu dengan peningkatan ketersediaan bahan pangan sumber karbohidrat non beras, pengembangan teknologi dalam menghasilkan pangan berbasis sumber daya lokal, dan pengembangan gerai atau outlet yang menjual pangan berbahan baku pangan lokal dengan penampilan yang lebih menarik dan harga yang terjangkau. Pengawasan ketahanan pangan dilakukan dengan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA).

b. Kendala yang dihadapi dari program diversifikasi pangan di Sumatera Utara yaitu banyak terjadinya konversi lahan pertanian ke nonpertanian, permasalahan irigasi dan degradasi sumber daya air, ketergantungan masyarakat terhadap beras yang masih sangat tinggi karena anggapan masyarakat bahwa beras lebih mudah untuk disimpan dan memiliki rasa yang enak, serta pangan lokal di pasaran yang masih dalam bentuk

belum siap olah membuat masyarakat kurang menyukainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka peneliti merekomendasikan:

- a. Perum Bulog Kanwil Sumut dapat mulai mengembangkan produksi pangan beras berbasis pangan lokal, seperti beras singkong. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut dan Perum Bulog Kanwil Sumut harus terus terlibat untuk mengedukasi masyarakat dalam peningkatan konsumsi pangan lokal sebagai makanan pokok sumber karbohidrat.
- b. Pemerintah harus terus menguatkan kebijakan diversifikasi konsumsi pangan melalui pangan lokal agar pangan yang dikonsumsi masyarakat lebih beragam dan dapat menurunkan tingkat konsumsi beras.
- c. Kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan tidak hanya dengan konsumsi beras sebagai sumber makanan pokok sumber karbohidrat. Akan tetapi, banyak pangan lokal yang kaya sumber karbohidrat yang dapat berpotensi sebagai makanan pokok masyarakat.

d. Perkembangan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan pengembangan teknologi pengolahan pangan perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya saing produk hasil pengolahan pangan lokal dan dapat lebih diminati oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arida, A., Sofyan, & Fadhiela, K. (2015). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan dan Konsumsi Energi. *Agrisep*, 16(1), 20-34.
- Burgui, D. (2020). Coronavirus: How action against hunger is responding to the pandemic. Retrieved from <https://www.actionagainsthunger.org/story/coronavirus-how-action-against-hunger-respondingpandemic>.
- Elizabeth, R. (2011). Strategi Pencapaian Diversifikasi dan Kemandirian Pangan: Antara Harapan dan Kenyataan. *Iptek Tanaman Pangan*, 6(2), 230-242.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta
- Kompas. (2020). *Bulog Garap Pangan Lokal*. Kompas tanggal 21 Juli 2020 hal. 9.
- Mamuaja, C.F. & Lamaega, J. C. E. (2015). Pembuatan Beras Analog dari Ubi Kayu, Pisang Goroho dan Sagu. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*, 3(2), 8-14.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Rosales, G., dan Mercado, W. (2020). Effect of changes in food price on the quinoa consumption and rural food security in Peru. *Scientia Agropecuaria*, 11(1), 83-93.
- Saliem, H. P., Purwoto, A., Hardono, G. S., Purwantini, T. B., Supriyatna, Y., Marisa, Y., & Waluyo. (2005). *Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.